

DAMPAK TRANSFER PAYMENT TERHADAP PENDAPATAN RUMAHTANGGA PETANI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

*(The Impact of Transfer Payment on Income of Farmers Household and Economic Development
in Indonesia)*

Achmad Zaini

*Program Studi Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Mulawarman, Samarinda 75123
Telp : (0541) 749130 ; Email : sosek-unmul@cbn.net.id*

ABSTRACT

This study analyzed the impact of transfer payment by high income household to low income household (farmers household) on economic development and income distribution in Indonesia. The value of disposable income between high income household and low income household are discrepancy. Based on result of policy simulation with social accounting matrix (SAM) analysis tested transfer of income 5 % by high income household to low income household the increasing average of output in agriculture sector was 1.20 % and agroindustry sector was 0.72 % and the increasing average of income total of household block was 5.34 %.

Keywords : high-low income household, transfer payment

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan landasan Trilogi Pembangunan, yaitu pembangunan yang berlandaskan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Ke tiga landasan tersebut merupakan strategi yang tepat dan dapat menjamin kontinuitas pembangunan di masa mendatang. Namun, pencapaian pembangunan yang berlandaskan Trilogi pembangunan tersebut sejak masa orde baru sering terjadi ketimpangan ketika salah satu landasan lebih diprioritaskan dari pada landasan yang lain. Ketika pemerintah lebih menekankan pencapaian tujuan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, ternyata mengabaikan aspek pemerataan pembangunan.

Ketimpangan hasil-hasil pembangunan terwujud juga dalam bentuk ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan regional juga terjadi dengan ditandai oleh adanya perbedaan perkembangan pembangunan antar daerah. Ketimpangan lain terutama ketimpangan sektoral terjadi dengan ditandai adanya pertumbuhan sektoral yang berbeda-beda terhadap perekonomian.

Oleh karena itu, pembangunan seharusnya dipahami sebagai suatu proses yang multidimensi dengan melibatkan soal pengorganisasian dan peninjauan kembali

keseluruhan ekonomi dan sosial. Selain peningkatan pendapatan dan output, juga peningkatan sistem kelembagaan, sistem sosial dan struktur administrasi serta sikap masyarakat dan bahkan menyangkut kebiasaan dan budaya (Todaro, 1994).

Setiap kebijakan pembangunan yang dilakukan haruslah mampu memberikan jawaban yang positif bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masalah kesenjangan dan kemiskinan. Apabila kebijakan pembangunan menyimpang dari permasalahan tersebut, maka pembangunan yang telah dilaksanakan belum bisa dikatakan berhasil, meskipun pendapatan per kapita yang dicapai berlipat ganda dari sebelumnya.. SAM merupakan suatu sistem data yang memungkinkan pembuatan suatu model ekonomi yang tidak hanya menghubungkan keterkaitan antar sektor ekonomi tetapi dapat juga dihubungkan dengan permasalahan *socioeconomic groups* seperti masalah distribusi pendapatan oleh institusi. Oleh karena itu, pendekatan model ini representatif digunakan untuk mengetahui pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan melihat distribusi penerimaan dari masing-masing golongan masyarakat yang ada.

Sebagai upaya untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan rumahtangga yang sering terjadi kesenjangan, diperlukan kebijakan yang dapat mendorong adanya perbaikan pemerataan pembangunan. Salah satunya adalah melalui

kebijakan transfer payment dari rumahtangga yang tergolong berpendapatan tinggi kepada golongan rumahtangga yang berpendapatan rendah. Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat dampak transfer payment terhadap pembangunan ekonomi dan distribusi pendapatan.

II. METODE PENELITIAN

Data utama yang digunakan adalah data SAM (*Social Accounting Matrix*) atau SNSE (Sistem Neraca Sosial Ekonomi) yang disusun oleh Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 1999. Data tersebut kemudian diolah dan dibangun kembali menjadi data SAM sesuai bentuk dasar dengan bantuan software program Excel dan GRIMP.

Model SAM (*Social Accounting Matrix*) pada dasarnya merupakan perluasan dari model input-output. Model SAM juga melihat potret perekonomian pada suatu saat tertentu, tetapi dengan ruang lingkup yang lebih luas lagi. Matriks transaksi ekonomi dalam model input-output hanya merupakan sebagian dan matriks transaksi SAM. Kalau dalam model input-output hanya dipaparkan arus transaksi ekonomi dari sektor produksi ke faktor-faktor produksi, pemerintah, rumah tangga, perusahaan dan luar negeri. Dalam SAM transaksi ekonomi di disagregasi lebih detail pada sektor-sektor produksi, faktor-faktor produksi, institusi (yang terdiri dari pemerintahan, rumah tangga, swasta) dan beberapa variabel makro ekonomi lainnya seperti modal, pajak, subsidi, ekspor, impordan sebagainya. Dengan demikian SAM bisa menggambarkan seluruh transaksi, sektoral dan institusi secara utuh dalam sebuah neraca dan yang lebih penting lagi SAM mampu menggambarkan arus distribusi pendapatan dalam halnya model input-output, SAM juga merupakan sebuah matrix yang terdiri atas kolom dan baris dimana kolom menjelaskan transaksi lain (*expenditure*) dan baris menjelaskan penerimaan (*receipt*). Total transaksi pada baris dan kolom jumlahnya harus sama, yang menandakan adanya sebuah keseimbangan.

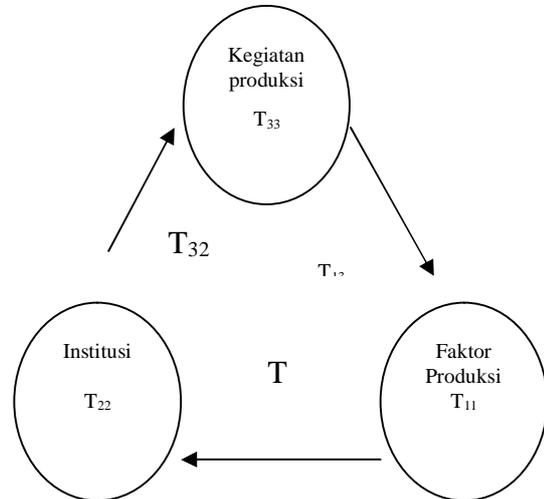
Model SAM secara sederhana dapat dirumuskan dengan sebuah persamaan matriks umum sebagai berikut.

$$Y = T + X \dots\dots\dots(1)$$

dimana :

$$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & 0 \\ 0 & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix} \dots\dots\dots(2)$$

Matriks transaksi T menunjukkan adanya transaksi antar neraca seperti T_{13} , T_{21} , T_{32} , dan transaksi dalam neraca sendiri yaitu T_{22} , dan T_{33} . Fenomena ini bisa juga kita gambarkan dalam sebuah diagram berikut :



Gambar 1. Transaksi Antarblok dalam SNSE

Pada baris satu, T_{13} menunjukkan penerimaan faktor produksi dan kegiatan produksi. Pada baris dua, T_{21} menunjukkan penerimaan institusi dari faktor produksi dan T_{22} menunjukkan penerimaan institusi dari institusi itu sendiri. Pada baris tiga, T_{32} menunjukkan penerimaan kegiatan produksi dari institusi dan T_{33} menunjukkan penerimaan kegiatan produksi dari kegiatan produksi itu sendiri.

Matriks transaksi T di atas menunjukkan aliran penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Apabila setiap sel dalam matriks T dibagi dengan jumlahnya, maka akan didapatkan sebuah matriks baru yang menunjukkan besarnya kecenderungan rata-rata pengeluaran (*average expenditure propensities*), A_{ij} dapat dirumuskan sebagai pengeluaran sektor (neraca) ke-j untuk sektor ke-i dibagi total pengeluaran ke-j; atau bila dirumuskan adalah sebagai berikut:

$$A_{ij} = T_{ij} / Y_j \dots\dots\dots(3)$$

dimana : A_{ij} adalah kecenderungan rata-rata pengeluaran neraca ke-j untuk neraca ke-i, T_{ij} adalah pengeluaran rata-rata neraca ke-j untuk neraca ke-i, dan Y_j adalah total pengeluaran neraca ke-j.

$$\text{matriks } A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & 0 \\ 0 & A_{32} & A_{33} \end{pmatrix} \dots\dots (4)$$

Persamaan (1) dan (3) di atas dapat dikerjakan lebih lanjut:

- $Y = AY + X \dots\dots\dots (5)$
- atau $A_{ij} = T_{ij} / Y_j \dots\dots\dots (6)$
- maka $(I-A) Y = X \dots\dots\dots (7)$
- atau $Y = (I-A)^{-1} X \dots\dots\dots (8)$
- jika $M_a = (I-A)^{-1} \dots\dots\dots (9)$
- maka $Y = M_a X \dots\dots\dots (10)$

Matriks A berisi koefisien-koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor yang lain. Sedangkan M_a disebut juga pengganda neraca (*accounting multiplier*) merupakan pengganda yang menunjukkan pengaruh perubahan pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan sistem SAM.

Sebagai wujud upaya *social security* dilakukan usaha kesadaran bagi golongan rumahtangga yang berpendapatan tinggi (Rumahtangga pertanian yang memiliki >1 hektar, rumahtangga golongan atas di desa, dan rumahtangga golongan atas di kota) melakukan transfer pendapatan kepada rumahtangga golongan rendah (rumahtangga buruhtani, rumahtangga golongan rendah di pedesaan, dan rumahtangga golongan rendah di perkotaan) sebesar 5 persen. Simulasi kebijakan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan SAM melalui shock berupa transfer payment yang dimasukkan ke dalam blok rumahtangga.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu keunggulan dari penggunaan SAM adalah mampu menunjukkan aktifitas ekonomi rumah tangga, terutama mengenai sumber-sumber pendapatan rumah tangga, transfer pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga, sebagaimana yang disajikan dalam berikut ini akan didapatkan sebuah matriks baru yang menunjukkan besarnya kecenderungan rata-rata pengeluaran (*average expenditure propensities*), A_{ij} dapat dirumuskan sebagai pengeluaran sektor (neraca) ke-j untuk sektor ke-i dibagi total pengeluaran ke-j; atau bila dirumuskan adalah sebagai berikut.

Dalam tabel di bawah kelihatan jelas selama periode 1999, kebanyakan institusi rumah tangga menggantungkan sumber pendapatannya pada penghasilan tenaga kerja yang berupa upah dan gaji. Terutama sekali bagi buruh tani, rumah tangga di pedesaan dan di perkotaan yang berpendapatan rendah, tenaga

kerja sepertinya merupakan sumber pendapatan yang paling utama dibandingkan sumber pendapatan lainnya. Pada tahun 1999, proporsi sumber pendapatan tenaga kerja bagi ketiga kelompok rumah tangga di atas 65%. Bahkan untuk, pendapatan bagi buruh tani berasal dari tenaga kerja sekitar 91%.

Tabel 1. Sumber-sumber pendapatan rumah tangga berdasarkan kelompok pendapatan tahun 1999 (%)

Sumber Pendapatan	Buruh tani	Pengusaha Tani	RT Desa Pendpt Rendah	RT Desa Pendapatan Tinggi	RT Kota Rendah	RT Kota Pendapatan Tinggi
TenagaKerja (Gaji& Upah)	90.62	82.25	70.06	49.66	76.92	55.80
Sewa (Modal)	5.63	15.61	27.68	46.63	22.12	41.76
Transfer dari RT	1.37	0.16	1.18	0.26	0.33	0.10
Transfer dari Perusahaan	0.10	0.02	0.09	0.01	0.07	0.02
Transfer dari Pemerintah	2.22	0.78	0.70	0.11	0.42	0.03
Remittance	0.06	1.18	0.29	3.32	0.14	2.29
Total	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber : SNSE Indonesia tahun 1999

Rumah tangga yang berpendapatan tinggi, baik itu di daerah pedesaan maupun perkotaan, tidak hanya menggantungkan pendapatannya dari tenaga kerja saja. Tetapi juga banyak mengharapkan dari pendapatan modal yang berupa sewa. Dalam tahun 1999, rata-rata pendapatan modal untuk kelompok rumah tangga yang berpendapatan tinggi di daerah pedesaan sekitar 47%, dan di daerah perkotaan sebesar 40%. Pada kedua kelompok rumah tangga ini, kelihatan perbandingan antara pendapatan dari modal dan tenaga kerja relatif sama besar. Fenomena ini memang sudah merupakan suatu karakteristik yang umum banyak ditemukan dalam kelompok rumah tangga yang berpendapatan tinggi. Dengan kata lain, jika suatu rumah tangga ingin pendapatannya lebih tinggi lagi maka ia harus mencari sumber yang lebih besar melalui faktor modal, selain pendapatannya dari tenaga kerja.

Ditinjau dari besarnya pendapatan disposable per-kapita antar golongan terjadi kesenjangan antara golongan rumahtangga yang berpendapatan rendah dan tinggi baik di desa maupun di kota. Hal ini dapat dilihat pada table berikut.

Pada tahun 1999, jumlah pendapatan disposable per kapita sebesar Rp 41 804.97 ribu.

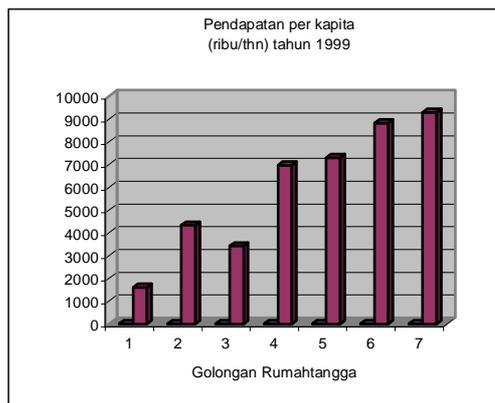
Pendapatan per kapita terendah dialami oleh buruh tani hanya sebesar Rp 1 604.87 ribu sedangkan rumahtangga non pertanian golongan atas di kota merupakan golongan rumahtangga yang memiliki pendapatan perkapita tertinggi yaitu sebesar Rp 9 307.38 ribu per tahun.

Tabel 2. Pendapatan disposable per kapita dirinci menurut golongan rumahtangga di Indonesia tahun 1999

Golongan Rumahtangga	Jumlah penduduk (jiwa)	Pendapatan per kapita (Rp ribu)
1. Rumahtangga buruh tani	30.608.337	1.604,87
2. RT Pertanian dg lahan 0,1-1 ha	53.704.242	4.340,85
3. RT Pertanian dg lahan >1 ha	10.618.552	3.432,18
4. RT non Pertanian gol rendah didesa	39.810.346	6.985,42
5. RT non Pertanian gol atas didesa	13.805.324	7.306,45
6. RT non Pertanian gol rendah dikota	40.987.495	8.827,79
7. RT non Pertanian gol atas dikota	17.902.804	9.307,38
Total	207.437.100	41.804,97

Sumber : SNSE Indonesia tahun 1999

Rumahtangga pertanian (buruhtani, rumahtangga pertanian dengan lahan 0.1-1 ha, dan RT pertanian dengan lahan lebih dari 1 ha) relatif pendapat disposable per kapitanya lebih rendah di bandingkan dengan golongan rumahtangga non pertanian baik di desa maupun di kota. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat tani relatif lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat non pertanian ditinjau dari besarnya pendapatan per kapita. Secara grafik dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1. Pendapatan perkapita.

Keterangan :

1. Rumahtangga buruh tani
2. Rumahtangga petani gurem (yang memiliki lahan < 0,5 ha)
3. Rumahtangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan 0,5 -1 ha
4. Rumahtangga pengusaha pertanian yang memiliki lahan >1 ha

5. Rumahtangga non pertanian gol. Bawah di desa
6. Bukan angkatan kerja di desa
7. Rumahtangga non pertanian gol. atas di desa
8. Rumahtangga non pertanian gol. Bawah di kota
9. Bukan angkatan kerja di kota.
10. Rumahtangga non pertanian gol. atas di kota

Hasil Simulasi Kebijakan

Simulasi dilakukan untuk menguji dampak kebijakan adanya *transfer payment* antar rumahtangga sebagai wujud *social security*. Untuk menguji dampak kebijakan dan *transfer payment* terhadap kinerja perekonomian dan distribusi pendapatan dilakukan dengan skenario Transfer pendapatan dari golongan rumah tangga yang berpendapatan tinggi (Rumahtangga pertanian yang memiliki >1 hektar, rumahtangga golongan atas di desa, dan rumahtangga golongan atas di kota) ke golongan rumah tangga yang berpendapatan rendah (rumahtangga buruhtani, rumahtangga golongan rendah di pedesaan, dan rumahtangga golongan rendah di perkotaan) sebesar 5 persen.

Sebagai wujud upaya *social security* akan lebih baik dilakukan usaha kesadaran bagi rumahtangga yang berpendapatan tinggi melakukan *transfer payment* kepada golongan rumahtangga yang mempunyai pendapatan rendah. Dampak simulasi berdasarkan transfer pendapatan dari golongan rumahtangga yang berpendapatan tinggi kepada golongan rumahtangga yang berpendapatan rendah dilakukan skenario *transfer payment* sebesar 5 persen. Hasil simulasi menunjukkan bahwa apabila ada *transfer* pendapatan dari rumahtangga golongan atas (Rumahtangga pertanian yang memiliki >1 hektar, rumahtangga golongan atas di desa, dan rumahtangga golongan atas di kota) kepada rumahtangga golongan rendah (rumahtangga buruhtani, rumahtangga golongan rendah di pedesaan, dan rumahtangga golongan rendah di perkotaan) sebesar 5 persen memang memberi dampak terhadap penurunan *output* produksi rata-rata sebesar 0.92 persen, namun kenaikan *output* produksi positif terjadi pada sektor pertanian seperti sektor tanaman pangan yang meningkat sebesar 1.57 persen dan sektor industri makanan, minuman, dan tembakau dan sektor perbankan dan asuransi pun meningkat masing-masing sebesar 0.82 persen dan 0.62 persen (Lampiran 1).

Dampak adanya *transfer payment* antar rumahtangga ini memang akan mengurangi penerimaan pemerintah sebesar 0.09 persen, akan tetapi, adanya *transfer payment* antar rumahtangga tersebut mampu meningkatkan penerimaan pada blok rumahtangga rata-rata

sebesar 5.34 persen, dimana rumahtangga yang tertinggi mengalami peningkatan adalah rumahtangga buruhtani yaitu sebesar 48.16 persen dan rumahtangga pertanian yang memiliki lahan 0.1-1 hektar meningkat sebesar 9.36 persen. Sedangkan pada blok faktor produksi ternyata juga terjadi peningkatan rata-rata sebesar 0.26 persen dimana tenagakerja pertanian mengalami peningkatan penerimaan tertinggi yaitu sebesar 0.98 persen. Hasil simulasi ini menunjukkan bahwa rumahtangga pedesaan yang berpendapatan rendah, termasuk pula buruh tani (*farm worker*), adalah yang cukup tinggi menikmati kenaikan pendapatan sebagai akibat pengaturan subsidi konsumtif tersebut. Semakin baik pelaksanaan dan pengaturan subsidi konsumtif oleh pemerintah kepada masyarakat, sekaligus juga mengindikasikan semakin besar transfer pendapatan dari rumahtangga yang berpendapatan tinggi ke rumahtangga yang berpendapatan rendah, maka semakin baik distribusi pendapatan yang terjadi dalam masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagian besar institusi rumah tangga menggantungkan sumber pendapatannya pada penghasilan tenaga kerja berupa upah dan gaji.
2. Masyarakat tani relatif lebih miskin dibandingkan dengan masyarakat non pertanian ditinjau dari besarnya pendapatan per kapita.
3. Kebijakan transfer pendapatan dari golongan rumahtangga berpendapatan tinggi kepada golongan rumahtangga berpendapatan rendah merupakan salahsatu bentuk *social security* yang relatif efektif untuk meningkatkan perekonomian (*output*) dan distribusi pendapatan rumahtangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Bautista,R., M. Robinson, dan M. Said. 1999. Alternative industrial development paths for Indonesia : SAM and CGE analysis. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
- Bautista,R. 2000. Agriculture-based development : A SAM perspective on central Vietnam. International Food Policy Research Institute, Washington, D.C.
- BPS. 2000. Laporan perekonomian Indonesia 2000. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- BPS 1999. Sistem neraca sosial ekonomi tTahun 1999. Biro Pusat Statistik, Jakarta.
- Chaundhary, A.A. 2000. Agriculture led development in Pakistan. <http://www.dawn.com>.
- Daryanto, A. 1995. Application input-ouput analysis: structural interdependence in the Indonesian economic with emphasis on the agriculture sector 1971-1985. Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Sutomo, S. 1995. Kemiskinan dan pembangunan ekonomi wilayah. Disertasi Doktor, Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Todaro, M.P. 1984. Pembangunan ekonomi di dunia ke tiga (Terjemahan). Erlangga, Jakarta.